

# REKONSTRUKSI NILAI-NILAI PESANTREN: IKHTIAR MEMBANGUN KESADARAN PLURALISME DALAM ERA MULTIKULTURAL

Ngainun Naim

## *Abstract*

*Pesantren as a social-religious-institution has played a significant role in the dynamic of Indonesia nation. The role of the pesantren is not only concerned with educational and social-religious aspects but also broader, namely social transformation. In developing pluralism awareness in multicultural era, the pesantren has the important role. At the pesantren, there are many values that can be applied to meet the challenge. The existence of the pesantren, nowadays, is closely related to social affairs. Thus, to optimize this role, it is necessary to make a serious, systematic and sustainable effort because not all of the pesantren has the urge to do it.*

*Keywords:* pesantren, social transformation, pluralism, multi-cultural

## A. Pendahuluan

Keragaman dalam segala segi kehidupan merupakan realitas yang tidak mungkin dihindari. Di dalam keragaman tersimpan potensi yang dapat memperkaya warna hidup. Masing-masing pihak—baik individu maupun komunitas—dapat menunjukkan eksistensi dirinya dalam interaksi sosial yang harmonis. Namun, dalam keragaman juga tersimpan potensi destruktif yang meresahkan. Spirit homogenitas, nafsu politik, nafsu menguasai, dan keinginan menjadi

---

Ngainun Naim, M.Ag adalah  
Dosen Tetap pada STAIN Tulungagung.  
Kini sedang menempuh S3 Studi Islam di  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

yang lebih dibandingkan yang lain, menjadi faktor yang dapat menghilangkan kekayaan khazanah kehidupan dalam keragaman yang ada.

Indonesia sesungguhnya sangat kaya pengalaman berkaitan dengan keragaman ini. Ada masa ketika keragaman menjadi kebanggaan bersama. Ada juga masa ketika keragaman menjadi petaka. Segenap pengalaman ini seyogyanya menjadi bahan pemikiran bersama untuk mengembangkan model-model penyelesaian yang tepat bagi setiap konflik dan memikirkan tentang bagaimana membangun secara sistematis kesadaran untuk memahami dan menyikapi secara positif realitas keragaman yang ada.

Memahami dan membangun kesadaran atas realitas keragaman seharusnya tidak hanya dilakukan ketika konflik telah terjadi. Tetapi yang justru jauh lebih penting adalah bagaimana kesadaran dan penghargaan atas keragaman ini menjadi agenda bersama yang terus menerus diperjuangkan, tanpa melihat apakah kondisinya sedang damai atau konflik. Dengan cara semacam ini, kehidupan damai dan saling menghargai akan menjadi kenyataan. Dalam kerangka pandang semacam inilah, salah satu elemen yang diharapkan dapat memainkan peran signifikan dalam usaha penciptaan kehidupan yang damai di tengah realitas keragaman adalah pondok pesantren.

## B. Peran Penting Pesantren

Pesantren selama ini lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Namun, sesungguhnya pesantren tidak hanya berkaitan dengan aspek pendidikan keagamaan. Dari dalam tubuh pesantren terkandung banyak potensi besar. Salah satunya adalah potensi penciptaan kehidupan yang damai dan berkeadaban. Potensi ini secara implisit, misalnya, diakui Djohan Effendi yang menyebut pesantren sebagai “kampung peradaban”.<sup>1</sup> Sebutan ini tentu menarik karena menunjukkan bahwa pesantren merupakan sebuah komunitas yang mampu memproduksi dan mereproduksi sebuah peradaban tersendiri. Pesantren tidak hanya menjadi institusi tempat para santri menuntut ilmu, tetapi juga institusi yang di dalamnya lahir karakteristik peradaban yang khusus. Dalam bahasa berbeda, Abdurrahman Wahid menyebutnya dengan “pesantren sebagai sub-kultur”.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Djohan Effendi. 2003. “Pesantren dan Kampung Peradaban, Sebuah Pengantar”. Dalam Hasbi Indra, *Pesantren dan Transformasi Sosial*. Jakarta: Penamadani, h. xviii.

<sup>2</sup> Abdurrahman Wahid. 2001. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Jakarta: Desantara, h. 135.

Senada dengan penilaian di atas, Mastuki HS dan Abd. Adhim menyebut pesantren sebagai artefak peradaban Indonesia. Artefak peradaban ini dibangun sebagai institusi pendidikan yang bercorak tradisional, unik, dan *indigenous*.<sup>3</sup> Sementara Hadimulyo menyebut pesantren sebagai “institusi kultural”. Penyebutan ini dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi pesantren yang memiliki karakteristik budaya tersendiri, sekaligus juga membuka diri terhadap pengaruh-pengaruh dari luar.<sup>4</sup>

Berbagai penilaian ini secara intrinsik menunjukkan bahwa pesantren memiliki hubungan sangat erat dengan budaya lokal. Pesantren mampu eksis karena—salah satunya—memiliki kemampuan merekonstruksi budaya yang sarat dengan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal. Mungkin sulit bagi sebuah institusi pendidikan dan sosial keagamaan mampu bertahan dalam jangka waktu sedemikian panjang sebagaimana pesantren, jika tidak mampu menawarkan perspektif akulturatif dan memiliki sifat yang fleksibel dengan tuntutan dan dinamika budaya lokal. Kemampuan berdialektika ini merupakan daya tarik, menjadi potensi, sekaligus nilai lebih yang dimiliki dunia pesantren. Jika saja segenap potensi pesantren direkonstruksi dan dikembangkan, diharapkan akan mampu menghasilkan perspektif dan jangkauan lebih luas. Dengan demikian, cakupan kinerja dan pengaruh pesantren tidak hanya berkaitan dengan aspek pendidikan dan agama, tetapi lebih jauh, juga bagaimana membangun kehidupan damai dalam masyarakat majemuk yang menghargai pluralitas dan multikultural. Ekspektasi ini bukanlah sebuah angan-angan belaka, tetapi didukung oleh fakta-fakta historis yang cukup kokoh.

Perjalanan panjang sejarah pertumbuhan dan perkembangan dunia pesantren membuktikan bahwa lembaga yang sering disebut secara pejoratif sebagai “komunitas kaum sarungan” tersebut berhasil melakukan adaptasi dengan perubahan lingkungannya. Kemampuan beradaptasi menjadikan dunia pesantren terus tumbuh dan berkembang secara dinamis sampai sekarang ini.

Selain kemampuan adaptasi, faktor lain yang juga mendukung eksistensi pesantren adalah dukungan masyarakat dan pemerintah

---

<sup>3</sup> Mastuki HS dan Abd. Adhim. 2004. *Sinergi Madrasah dan Pondok Pesantren*. Jakarta: Dirjen Bagais Depag RI, h. 19

<sup>4</sup> Hadimulyo. 1980. “Dua Pesantren, Dua Wajah Budaya”. Dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*. Jakarta: LP3ES, h. 99.

yang peduli terhadap perkembangan pesantren. Komitmen sosial pesantren kepada masyarakat sudah terbukti, dan tidak perlu diragukan lagi. Pesantren, meminjam terminologi Kuntowijoyo, selain “memiliki” lingkungan, ia juga “milik” lingkungannya.<sup>5</sup>

Kondisi inilah yang menjadikan pesantren memiliki daya tahan luar biasa dalam menghadapi tekanan dari luar, baik dari negara, masyarakat, maupun tekanan global. Namun demikian, tidak bisa dinafikan juga dengan dimensi di dalam tubuh pesantren, sebab dimensi inilah yang sesungguhnya menjadi fondasi paling fundamental. Sebagaimana dikatakan Zamakhsyari Dhofier, dinamika komunitas pesantren dipengaruhi beberapa aspek, yaitu sistem nilai pendidikannya yang fleksibel, kuatnya hubungan elemen tradisi pesantren, dan kebebasan yang diberikan oleh negara terhadap pertumbuhan lembaga pendidikan Islam.<sup>6</sup> Hal inilah yang menjadikan pesantren sebagai satu-satunya institusi pendidikan milik masyarakat pribumi yang mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membentuk masyarakat melek huruf (*literacy*) dan melek budaya (*culture literacy*).<sup>7</sup>

Secara lebih mendetail, Azyumardi Azra menelusuri karakteristik dasar yang menjadikan pesantren sebagai sebuah institusi yang fungsional. Menurut dia, ada tiga fungsi tradisional pesantren, yaitu; *pertama*, transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam; *kedua*, pemeliharaan tradisi Islam; dan *ketiga*, reproduksi ulama.<sup>8</sup> Lebih lanjut Azra menyatakan bahwa pesantren bisa bertahan dalam dinamika sosial yang sedemikian cepat bukan hanya karena kemampuannya untuk *adjustment* dan *readjustment*, tetapi juga karena karakter eksistensialnya, yang dalam bahasa Cak Nur disebut sebagai lembaga yang tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga “mengandung makna keaslian Indonesia” (*indigenous*). Sebagai lembaga *indigenous*, pesantren muncul dan berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya. Dengan kata lain, pesantren mempunyai keterkaitan erat yang tidak terpisahkan dengan

<sup>5</sup> Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*. Bandung : Mizan, h. 248.

<sup>6</sup> lihat Zamakhsyari Dhofier. 1994. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Para Kyai*. Jakarta: LP3ES, Cet. IV, h. 21.

<sup>7</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. xiii

<sup>8</sup> Azyumardi Azra. 1997. “Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan”. Dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, h. xxi.

komunitas lingkungannya. Kenyataan ini bisa dilihat tidak hanya dari latar belakang pendirian pesantren pada suatu lingkungan tertentu, tetapi juga dalam pemeliharaan eksistensi pesantren itu sendiri melalui pemberian wakaf, sadaqah, hibah, dan sebagainya. Sebaliknya, pesantren pada umumnya “membalas jasa” komunitas lingkungannya dengan bermacam cara; tidak hanya dalam bentuk memberikan pelayanan pendidikan dan keagamaan, tetapi juga bimbingan sosial, kultural, dan ekonomi bagi masyarakat lingkungannya. Dalam konteks terakhir inilah pesantren dengan kiainya memainkan peran yang disebut Clifford Geertz sebagai “cultural brokers” (pialang budaya) dalam pengertian yang seluas-luasnya.<sup>9</sup>

Menyimak berbagai dimensi yang melekat dalam dunia pesantren, maka wajar jika pesantren memiliki nilai lebih dibandingkan dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan lainnya. Secara lebih tegas, Abd A’la menyatakan bahwa karakteristik pesantren yang merupakan kelebihanannya terletak pada segala sesuatu yang sudah akrab dengan masyarakat dan perpaduan antara aspek teoretis dan praktis.<sup>10</sup> Apa yang diutamakan untuk diajarkan di dalam institusi pesantren bukan hanya berkaitan dengan pengamalan hukum atau aspek akhlak semata, melainkan juga pemekaran pengertian tentang kehidupan dan hakikat manusia serta kehidupan masyarakat.<sup>11</sup> Pesantren mendapat pengaruh dan penghargaan besar yang mampu mempengaruhi seluruh elemen kehidupan masyarakat. Hal ini dibuktikan misalnya, di Jawa dan Madura, pesantren menduduki posisi strategis di berbagai lapisan masyarakat.<sup>12</sup> Dunia pesantren menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan. Tidak hanya berkaitan dengan aspek agama saja, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

### C. Rekonstruksi Nilai

Dalam kerangka membangun kesadaran dan sikap positif terhadap pluralitas dan multikultural kepada masyarakat, maka hal penting yang harus dilakukan pesantren adalah melakukan rekonstruksi nilai-nilai yang ada. Pesantren sendiri memiliki banyak nilai positif yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. xxv-xxvi.

<sup>10</sup> Abd. A’la. 2006. *Pembaruan Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, h. 17.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 18.

<sup>12</sup> Sukamto. 1999. *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*. Jakarta: LP3ES, h. 12.

dikembangkan, seperti kemandirian, kesederhanaan, dan keikhlasan. Nilai-nilai tersebut dibingkai dengan paradigma yang sangat menekankan apresiasi terhadap segala tradisi yang baik dan akomodatif terhadap bentuk-bentuk reformasi yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>13</sup> Nilai dan bingkai paradigmatis inilah yang menjadikan pesantren sebagai sebuah komunitas yang kaya dengan perspektif kehidupan.

Secara lebih mendasar, nilai yang membingkai kehidupan pesantren adalah nilai ibadah untuk menghasilkan seorang lulusan yang saleh. Seseorang yang belajar di pesantren pada umumnya hanya karena ingin memperoleh kesalehan. Kata "saleh" memang menjadi inti dalam kehidupan pesantren, karena seluruh program pesantren diarahkan pada hal ini.<sup>14</sup> Dalam perkembangannya, nilai ibadah tidak hanya berimplikasi pada aspek ibadah semata, tetapi juga masuk ke dalam ranah sosial, budaya, politik, dan juga kebudayaan. Sebagaimana dikatakan Azra, hasil dari semua modal yang dimiliki pesantren adalah perannya yang mampu memberikan sumbangan penting dalam proses transmisi ilmu-ilmu Islam, reproduksi ulama, pemeliharaan ilmu dan tradisi Islam, bahkan pembentukan dan ekspansi masyarakat Muslim santri.<sup>15</sup>

Karakteristik yang dimiliki pesantren dalam konteks semacam inilah yang dalam perkembangannya memiliki warna yang khas. Apabila dikaitkan dengan keperluan untuk menemukan suatu pola pembangunan yang bersifat "*indigenous*", asli sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia, termasuk bagaimana membangun sebuah masyarakat yang adil dan damai, maka akses pesantren untuk memenuhi keperluan tersebut terbuka lebar, sebab pesantren adalah lembaga asli Indonesia yang paling besar dan mengakar kuat.<sup>16</sup> Tidak ada lembaga lain di Indonesia yang memiliki kekhasan dan pengakuan kuat dari masyarakat sebagaimana pesantren. Bahkan A. Malik Fadjar menyebut bahwa pesantren telah menjadi semacam *local genius*.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Abd. A'la, *Pembaruan*, h. 19.

<sup>14</sup> Moeslim Abdurrahman. 1997. *Islam Transformatif*. Jakarta : Pustaka Firdaus, Cet. III, h. 53.

<sup>15</sup> Azyumardi Azra. 1999. *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina, h. 184-185.

<sup>16</sup> Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik*, h. 87-88.

<sup>17</sup> A. Malik Fadjar. "Sintesa antara Perguruan Tinggi dan Pesantren". Dalam Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik*, h. 111.

Dengan segala karakteristik yang melekat, merupakan hal yang wajar jika pesantren memiliki dinamika dan viabilitas yang cukup tinggi dalam merajut Islam Indonesia. Pesantren pernah membuktikan kemampuannya dalam mendialogkan Islam dengan dimensi sosial budaya masyarakat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan telah berkiprah besar dalam pengembangan ilmu keislaman “tradisional” dalam bingkai Aswaja dan moralitas luhur yang disandingkan dengan kearifan lokal. Berdasarkan nilai yang dianut pesantren, Islam nyaris menjadi bagian intrinsik dari budaya masyarakat Islam Indonesia dengan karakteristiknya yang pluralis, berwatak kerakyatan dan kebangsaan.<sup>18</sup>

Namun demikian, dengan mengacu kepada nilai-nilai monoteisme teologis, nilai-nilai dan tradisi pesantren yang lain perlu dibaca kembali berdasarkan persoalan-persoalan konkret yang dihadapi pesantren dan masyarakat. Kemandirian, misalnya, tidak dimaknai sebagai ketidaktergantungan dalam dimensi ekonomi terhadap kelompok atau pihak lain. Akan tetapi, hal itu juga merupakan representasi dan sikap kritis pesantren dan masyarakat dalam menyikapi isu-isu dan persoalan yang terus menghantam mereka. Demikian pula, keikhlasan perlu diangkat sebagai nilai yang mengedepankan proses dan prestasi, bukan sekedar prestise sebab pertanggungjawabannya bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Dalam keikhlasan itu perlu pula ditumbuhkan nilai-nilai kesabaran dan kemaafan karena hidup pada intinya adalah proses panjang yang terus bergerak yang tidak dapat disulap “selesai sekejap”. Realitas menunjukkan bahwa dalam melakukan proses itu, persinggungan dalam beragam bentuknya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain menjadi tidak terhindarkan.

Pemaknaan secara kreatif ini perlu dilakukan terhadap tradisi dan nilai-nilai pesantren lainnya. Kesederhanaan tidak dapat direduksi menjadi “rela hidup dalam kemiskinan”. Nilai ini sejatinya merujuk kepada upaya untuk menjalani kehidupan sesuai dengan keperluan sehingga pesantren dan masyarakat menyadari akan segala sesuatu yang menjadi keperluannya dan apa yang bukan kebutuhannya. Kesederhanaan adalah lawan dari pemborosan dan keserakahan.<sup>19</sup>

Perspektif ini menunjukkan bahwa Islam dan budaya lokal memiliki keterkaitan yang sangat erat dan memang tidak dapat dipisahkan satu

---

<sup>18</sup> Abd. A'la, *Pembaruan*, h. xii-xiii.

<sup>19</sup> Abd. A'la, *Pembaruan*, h. 11-13.

sama lain sehingga sangat logis bila artikulasi dan ekspresi keislaman tidak pernah berwajah tunggal. Ekspresi keislaman senantiasa menampilkan wajah plural karena pada hakikatnya ekspresi tersebut merupakan kerangka interpretasi dan dialektika antara keduanya.

#### D. Peran Transformatif

Ada beragam alasan dan argumentasi yang memperkokoh peranan penting pesantren dalam melakukan peran transformatif. Salah satunya adalah karena posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan segenap nilai-nilai fundamental yang dianutnya. Lembaga pendidikan, sebagaimana dinyatakan Christopher J. Lukas, adalah markas penyimpanan kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan yang dimiliki lembaga pendidikan—termasuk pesantren—adalah akses terhadap keseluruhan aspek kehidupan, memberi informasi yang paling berharga mengenai pegangan hidup masa depan, serta membantu generasi mempersiapkan kebutuhan esensialnya dalam menghadapi perubahan.<sup>20</sup>

Transformasi adalah suatu proses terciptanya hubungan (*structure*) yang secara mendasar baru dan lebih baik. Strategi transformasi yang dimaksudkan dalam tulisan ini lebih tepat disebut sebagai transformasi dalam budaya. Model transformasi semacam ini memungkinkan kita untuk tetap memiliki pluralisme budaya dan memberikan ruang untuk setiap masyarakat agar mereka menciptakan sejarah mereka sendiri.

Proses transformasi paling esensial yang mampu dilaksanakan pesantren adalah melalui proses pembelajaran. Namun demikian, proses transformasinya tidak sebatas dalam pembelajaran terhadap para santri, tetapi juga dalam kerangka lebih luas. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat lewat beragam bentuk merupakan kontribusi pesantren yang tidak dapat dipungkiri dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti dan makna kebersamaan dalam kehidupan yang sarat dengan nilai-nilai pluralitas dan multikulturalitas.

Pendekatan transformatif sangat menekankan dimensi keadilan dalam setiap transformasi sosial. Dengan demikian, perubahan adalah usaha untuk memperkuat kemampuan diri, mengaktualisasikan referensi-referensi kebudayaan, agar masyarakat itu sendiri mampu melakukan transformasi kepada kehidupan yang lebih berharkat.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> A. Malik Fadjar. 1998. *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*. Jakarta: LP3NI, h. 19.

<sup>21</sup> Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, h. 8.



Dalam konteks transformasi nilai dalam pembelajaran, aspek penting yang selayaknya memperoleh perhatian adalah bagaimana pesantren melakukan reorientasi pembelajarannya. Pembelajaran membutuhkan kontekstualisasi dan reorientasi agar tidak kehilangan relevansinya dengan dinamika dan perkembangan sosial di sekelilingnya. Secara umum, pendidikan pesantren sekarang ini nampaknya masih didominasi oleh pola dogmatik-tekstualis, yang sebenarnya bermuara pada asumsi dasar paradigma klasik-skolastik yang terlalu menggariskan keyakinan dan anggapan bahwa keselamatan sosial amat ditentukan oleh dan bergantung kepada keselamatan individual. Dengan paradigma ini maka muncul asumsi bahwa jika individu-individu dalam masyarakat bertingkah laku baik dan bermoral secara agamis, maka secara otomatis masyarakat juga akan berlaku baik dan bermoral. Namun, sesungguhnya asumsi semacam ini merupakan bentuk simplifikasi karena dalam realitas kehidupan kelompok tidaklah demikian. Logika, psikologi, sentimen, kepentingan, fanatisme, dan komitmen individu berbeda dengan kelompok.

Berkaitan dengan tantangan modernitas yang kian kompleks, terutama dengan pluralitas dan multikulturalitas, perlu juga dilakukan beberapa agenda reorientasi pembelajaran di lingkungan pesantren. Beberapa agenda yang dapat dilakukan adalah; *pertama*, selain memberi uraian tentang ilmu-ilmu keislaman klasik, anak didik perlu juga diperkenalkan dengan persoalan-persoalan modernitas yang amat kompleks sebagaimana dihadapi umat Islam sekarang ini dalam hidup keseharian mereka. Pendekatan-pendekatan keilmuan sosial keagamaan yang saat ini berkembang juga penting untuk diperkenalkan.

*Kedua*, pengajaran ilmu-ilmu keislaman tidak seharusnya selalu bersifat doktrinal, melainkan perlu dikedepankan uraian dimensi historis dari doktrin-doktrin keagamaan tersebut. Dengan demikian, dimungkinkan untuk melakukan telaah kritis-apresiasi-konstruktif terhadap khazanah intelektual Islam klasik dan sekaligus memberi peluang dan kesempatan melatih para peserta didik untuk merumuskan ulang pokok-pokok rumusan realisasi doktrin agama yang sesuai dengan tantangan dan tuntutan zaman dan bagaimana mereka dapat mencari jalan keluar (*problem solving*) sesuai dengan nilai-nilai keagamaan Islam yang mereka yakini.

*Ketiga*, pengajaran yang dulunya hanya bertumpu pada teks (*nash*) perlu diimbangi dengan telaah yang cukup mendalam dan cerdas terhadap konteks dan realitas, mengingat bahwa *nash* itu terbatas, sedangkan kejadian-kejadian yang dialami umat manusia selalu berkembang

(*al-nushûsh mutanâbiyah wa al-waqâi' ghoiru mutanâbiyah*). Oleh karena itu, diperlukan ilmu-ilmu bantu yang diambil dari disiplin psikologi, sejarah, filsafat, sosiologi, ekonomi, politik, dan ilmu-ilmu yang lainnya, untuk menjelaskan hakikat, visi, dan misi agama Islam yang fundamental.

*Keempat*, dalam era pluralitas iman yang semakin mencuat dan menguat, diskursus yang melakukan telaah secara akademik filosofis terhadap khazanah intelektual Islam klasik, khususnya tasawuf, sangat diperlukan untuk mengimbangi telaah yang bersifat doktrinal dari cabang keilmuan kalam. Pelaksanaan pendidikan Islam kontemporer sering dikritik lantaran terlalu banyak menekankan aspek kognitif anak didik dan kurang memberikan tekanan pada aspek afektif dan psikomotorik karena pelajaran budi pekerti dan akhlak batiniah, yang bernuansa penghayatan tasawuf, kurang begitu ditanamkan oleh para pendidik agama di sekolah-sekolah formal maupun oleh para orang tua di rumah. Penghayatan dan internalisasi tasawuf adalah sebuah metode pendidikan dan pengajaran sekaligus yang lebih menekankan kematangan dan kedewasaan berpikir dan perilaku: seperti penanaman sifat rendah hati, kesabaran, toleransi, tenggang rasa, kepuasan batiniah, cara berpikir yang matang, dan seterusnya.

*Kelima*, pendidikan agama Islam era modernitas tidak lagi memadai jika hanya terfokus pada pembentukan "moralitas individual" yang saleh, namun kurang begitu peka terhadap "moralitas publik". Padahal, moralitas publik sangat terkait dengan realitas struktur sosial-ekonomi, sosial-politik, dan sosial-budaya yang mempunyai logika kepentingan sendiri-sendiri. Persatuan antara struktur sosial-politik dengan sosial-ekonomi dapat dilihat dari fenomena tayangan iklan di berbagai televisi swasta yang demikian marak. Dalam kondisi semacam ini, pendidikan Islam perlu memasuki diskursus moralitas publik, lantaran sumber kejahatan moral tidak lagi hanya bersumber dari individu-individu, melainkan telah bergeser ke jaringan struktur yang sangat kompleks.<sup>22</sup>

Pesantren dengan sistem dan karakter tersendiri telah menjadi bagian integral dari suatu institusi sosial masyarakat, khususnya pedesaan. Meski mengalami pasang surut dalam mempertahankan misi dan eksistensinya, namun sampai kini pesantren tetap *survive*. Bahkan beberapa di antaranya muncul sebagai model gerakan alternatif bagi

<sup>22</sup>M. Amin Abdullah. 2005. *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*. Jakarta: PSAP, h. 78-81.

pemecahan masalah-masalah sosial masyarakat desa. Seperti yang dilakukan Pondok Pesantren Pabelan dan juga beberapa pesantren lainnya.

Bersama dengan LSM, Pesantren Pabelan telah menjadi contoh bagi kegiatan pengembangan masyarakat melalui pesantren. Pesantren penerima penghargaan Aga Khan tahun 1980 ini menjadi inspirator bagi masyarakat dalam membangun rumah yang sehat. Selain itu, Pesantren Pabelan ini juga mendorong masyarakat peduli terhadap pendidikan anak-anaknya dengan membebaskan biaya pendidikan buat sekitar 200 santri yang berasal dari desa sekitar Pabelan. Pesantren ini juga dikenal sebagai inovator di bidang pertanian dengan memberikan bantuan ternak ayam, lele dumbo, dan salak pondoh bagi petani di desa sekitarnya. Aktifitas yang dilakukan adalah mengganti intelektualisme verbal menjadi intelektualisme yang lebih mementingkan 'kerja tangan'. Di sini terlihat bahwa pesantren bukan hanya penyelenggara pendidikan tetapi juga penyelenggara dakwah yang mengajak pada perubahan masyarakat, antara lain dengan penyebaran ketrampilan, pengembangan manajemen usaha kecil, eksperimentasi dalam pertanian, industri kecil, dan sebagainya.

Efektifitas pesantren untuk menjadi *agent of change* sebenarnya terbentuk karena sejak awal keberadaannya pesantren juga menempatkan diri sebagai pusat belajar masyarakat, *community learning centre*. Hasil dari kegiatan tersebut bukan orang-orang yang berijazah, yang mengikuti pendidikan formal, tetapi sikap hidup bersama-sama. Ajaran-ajaran yang dituturkan kiai telah membentuk pandangan, nilai-nilai, dan sikap hidup masyarakat. Padahal, pembangunan oleh pemerintah sering tidak mampu menjangkau sisi ini.

Gerak pesantren dilandaskan pada amal saleh, sebagai refleksi dari penghayatan dan pemahaman keberagamaan sang kiai, pemimpin pesantren. Ini yang membuat setiap pesantren mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri dalam melakukan kiprahnya, yang dipengaruhi oleh figur kiai, serta lingkungan sosial pada suatu ruang dan waktu tertentu. Namun, ada satu hal yang sama yang melandasi gerak tersebut, yaitu berangkat dari sikap dan keyakinan agama, serta orientasi pada masyarakat.<sup>23</sup>

Keberadaan pesantren sebagai lembaga keislaman yang sangat kental dengan karakteristik Indonesia ini memiliki nilai-nilai strategis

---

<sup>23</sup> "Pesantren: Dari Pendidikan hingga Politik", *Kompas*, 14 Oktober 1996, dimuat kembali dalam Nurcholil Madjid, *Bilik-Bilik*, h. 124-126.

dalam pengembangan masyarakat Indonesia. Secara substansial, pesantren merupakan institusi keagamaan yang tidak mungkin dilepaskan dari masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Lembaga ini tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat dengan memposisikan dirinya sebagai bagian masyarakat dalam pengertiannya yang transformatif. Pesantren berikhtiar meletakkan visi dan kiprahnya dalam kerangka pengabdian sosial yang pada mulanya ditekankan kepada pembentukan moral keagamaan dan kemudian dikembangkan kepada rintisan-rintisan pengembangan yang lebih sistematis dan terpadu.<sup>24</sup>

Pengabdian masyarakat yang dilakukan pesantren merupakan manifestasi nilai-nilai yang dianut pesantren. Nilai pokok dalam komunitas santri adalah seluruh kehidupan ini diyakini sebagai ibadah. Maksudnya, kehidupan duniawi disubordinasikan dalam rangkuman nilai-nilai ilahi yang telah mereka peluk sebagai sumber nilai tertinggi.<sup>25</sup> Dari nilai pokok ini berkembang nilai-nilai luhur lainnya, seperti keikhlasan, kesederhanaan, dan kemandirian. Nilai-nilai ini merupakan dasar yang dijadikan landasan dalam pendidikan dan pengembangan masyarakat. Secara potensial, nilai-nilai ini memiliki peluang cukup besar untuk dijadikan dasar pijakan dalam menyikapi beraneka tantangan kehidupan yang kian kompleks, termasuk tantangan kehidupan dalam masyarakat multikultural. Persoalannya adalah bagaimana mengembangkan dan melabuhkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kaum santri dan masyarakat, serta merumuskan ulang sesuai dengan tantangan yang ada. Tanpa melakukan hal ini, kandungan nilai yang cukup potensial tersebut hanya akan menjadi simbol-simbol formalistik yang tidak operasional.

Pengembangan masyarakat menjadi sesuatu yang tidak terelakkan untuk diletakkan secara utuh dalam sistem pendidikan yang dilakukan pesantren, sebab Islam pada hakikatnya adalah agama yang mengajarkan umatnya melakukan pembebasan umat manusia secara keseluruhan dari segala belenggu yang akan mereduksi nilai-nilai kemanusiaan. Sejak awal, monoteisme yang diajarkan Nabi Muhammad adalah kebertauhidan yang terkait erat dengan humanisme dan rasa keadilan ekonomi dan sosial yang intensitasnya tidak kurang dari persoalan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 2-3.

<sup>25</sup> Bahtiar Effendy. 1985. "Nilai Kaum Santri". Dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren*. Jakarta: P3M, hal. 49.

tauhid itu sendiri. Oleh karena itu, peran ini meniscayakan pesantren melibatkan diri ke dalam pengentasan umat manusia dan masyarakat dari segala proses yang akan membuat mereka tidak berdaya.

Aspek yang penting untuk dipertimbangkan dalam menuju peran transformatif ini adalah bagaimana memperpendek jarak, atau bahkan membangun sinergi, antara “pusat teks” dengan “konteks sosial”. Apakah agama dapat menghindari fungsinya yang bersifat legitimatif? Agama tetap bisa menumbuhkan mekanisme kritis dalam dinamika agama itu sendiri, baik melalui ijtihad sebagai metode intelektual dalam memahami pesan agama maupun secara langsung jika agama diharapkan perannya untuk menyelesaikan problematik masyarakat yang aktual.<sup>26</sup>

Peran transformatif dengan basis agama yang kokoh ini oleh Moeslim Abdurrahman disebut sebagai teologi transformatif. Menurutnya, usaha melaksanakan eksperimentasi teologi transformatif dilakukan selain dengan belajar dari kelemahan cara kerja NGO—yang tidak secara eksplisit memasukkan paradigma teologi dalam proses pengembangan masyarakat—juga dengan mencari pendekatan baru. Yaitu melakukan penafsiran teks dengan kesadaran akan konteksnya dan kemudian mempelajari konteks secara dialogis. Dengan demikian, teks benar-benar hidup dalam realitas empiris dan mengubah keadaan masyarakat ke arah transformasi sosial yang diridhoi Allah. Teologi transformatif lebih menekankan pada hubungan dialogis antara teks dengan konteks, dan tidak cenderung melakukan pemaksaan realitas menurut model ideal. Pengembangan teologi ini juga sebagai upaya untuk mengatasi perdebatan tentang pilihan antara pendekatan budaya atau pendekatan struktural dalam pengembangan masyarakat. Dalam proses teologi transformatif, selain melibatkan analisis sosial bersama untuk memahami konteks, juga perlu refleksi iman bersama yang terungkap dalam simbol-simbol keagamaannya.<sup>27</sup>

Transformasi sepatutnya menjadi gerakan kemanusiaan yang mampu mengantarkan kehidupan sosial yang sederhana di depan Allah Swt.; suatu gerakan transformatif yang menumbuhkan kepedulian terhadap nasib sesama, dan yang melahirkan aksi solidaritas, yakni bertujuan mempertalikan mitra insani atas dasar kesadaran iman, bahwa sejarah

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 12.

<sup>27</sup> Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, h. 27.

suatu kaum hanya akan diubah oleh Tuhan jika ada kehendak dan upaya dari semua anggota kaum itu sendiri. Transformasi rupanya memang jalan yang paling manusiawi untuk mengubah sejarah kehidupan umat manusia. Sebab, dalam proses ini yang berlaku adalah pendampingan dan bukan pengarahan apalagi pemaksaan. Transformasi pada dasarnya adalah juga gerakan kultural yang didasarkan pada liberalisasi, humanisasi, dan transendensi yang bersifat profetik. Yakni perubahan sejarah kehidupan masyarakat oleh masyarakat sendiri ke arah yang lebih partisipatif, terbuka, dan emansipatoris.<sup>28</sup>

Pesantren didirikan bertujuan untuk melakukan transformasi sosial bagi (masyarakat) daerah sekitar. Ia hadir untuk mengabdikan diri pada pengembangan dakwah Islam dalam pengertian luas, mengembangkan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, dan pada gilirannya didukung secara penuh oleh mereka. Dengan demikian, pelibatan pesantren dalam transformasi masyarakat memang cukup relevan dan kontekstual. Selain itu, juga realitas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas terdiri dari komunitas Muslim pada umumnya menetap di pedesaan. Pada sisi ini, pesantren yang memang berkembang dan tersebar di daerah-daerah pedesaan yang, sampai derajat tertentu, merupakan representasi dari masyarakat Muslim daerah-daerah pedesaan. Kenyataan ini membuat pesantren sampai saat ini masih memiliki pengaruh yang kuat pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat pedesaan yang taat.<sup>29</sup>

Pengalaman Pesantren Annuqayah dalam melakukan transformasi sosial menarik untuk dijadikan eksemplar. Pesantren yang terletak di Pulau Madura ini memiliki peran besar dalam menumbuhkan iklim perdamaian tanpa kekerasan. Dalam penjelasan Abd A'la, untuk menyumbat dan menghindari kekerasan sebagai fenomena masyarakat, *da'wah bi al-aqwâl* yang telah dilaksanakan perlu dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam *da'wah bi al-hâl*. Dalam bahasa lain, nilai-nilai keagamaan tentang keadilan, kesejahteraan, dan sejenisnya yang sudah diperkenalkan lewat pengajian perlu dilabuhkan dalam masyarakat melalui kerja-kerja konkret. Kesejahteraan yang dialami masyarakat diyakini akan membuat akar-akar kekerasan menjadi rapuh dan tidak dapat berkembang baik dalam kehidupan. Kesadaran itu yang kemudian dibingkai teologis

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 40.

<sup>29</sup> Abd A'la, *Pembaruan*, h. 47-48.

yang substansial dan non-dikotomis mengantarkan pesantren ini mengembangkan pola pendekatan “baru” dalam menyebarkan keberagaman dalam bentuk kegiatan yang lebih kontekstual dan transformatif.

Sebagai realisasi dari hal itu, sejak sekitar 1979, Annuqayah mencoba mengembangkan peranannya dalam masyarakat melalui suatu rintisan Program Pengembangan Masyarakat. Hasil nyata dari kegiatan itu sedemikian “cepat” dan langsung dinikmati masyarakat, dan dampaknya pun mendorong pesantren-pesantren lain di sekitar Annuqayah melakukan kegiatan serupa. Tepat pada Hari Lingkungan Hidup Nasional tahun 1981, Annuqayah memperoleh penghargaan Kalpataru karena prestasinya menyelamatkan lingkungan melalui kegiatan penghijauan di perbukitan gundul di beberapa tempat dan di sepanjang tepian jalan di sekitar Annuqayah. Demikian pula, Annuqayah berhasil mengatasi kekurangan air yang dialami masyarakat di Kampung Rembang, Kecamatan Pragaan yang berada sekitar 4 kilometer dari Annuqayah.

Selain itu, Annuqayah lewat Biro Pengabdian Masyarakat (BPM), juga mengembangkan usaha bersama pengrajin tikar, pemberian kredit pupuk, dan pembaruan cara pembakaran gamping, serta simpan pinjam berjaminan di kalangan masyarakat luas. Dalam melakukan kerjasama rintisan itu, Annuqayah lebih berperan sebagai mitra atau pendamping sehingga tidak menimbulkan ketergantungan yang merugikan dari masyarakat pada pesantren. Pesantren lebih berperan sebagai agen perubahan dengan melakukan proses penyadaran kepada masyarakat tentang persoalan-persoalan yang mereka hadapi, dan pada saat yang sama mengenalkan cara penyelesaiannya melalui potensi dan kemampuan yang mereka miliki sendiri.

Dampak dari itu semua adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara cukup signifikan. Selain itu, kekerasan dalam bentuk carok juga mulai menurun drastis, dan kekerasan secara umum kian sulit menemukan tempat berlabuh dalam kehidupan masyarakat sekitar.

Selanjutnya, komunitas Annuqayah juga terlibat aktif melakukan kajian-kajian tentang agama, politik, dan sebagainya melalui organisasi-organisasi sosial keagamaan yang ada di Sumenep. Melalui kegiatan ini, masyarakat bersama pesantren kian memiliki kemampuan untuk membedakan antara ajaran dan nilai-nilai agama di satu pihak, dan “radikalisme agama” di pihak lain. Berdasarkan dialog dengan tokoh-tokoh intelektual dan ulama, masyarakat mengetahui serta menyadari bahwa radikalisme agama tidak lebih dari sekadar politisasi agama

yang tujuannya lebih berorientasi kepada kekuasaan. Dalam pandangan sebagian besar mereka, radikalisme atau bentuk kekerasan lainnya, tidak akan pernah menyelesaikan persoalan, justru akan menimbulkan persoalan baru.<sup>30</sup>

Mencermati kiprah Annuqayah, terlihat beberapa indikator keberhasilan peran transformatif yang dilakukan. Proses transformasi dinilai berhasil jika memiliki beberapa indikator; (1) perubahan sistem nilai yang prosesnya mulai dari penerimaan nilai baru dengan proses integrasi ke disintegrasi untuk selanjutnya menuju reintegrasi; (2) perubahan sistem makna dan sistem pengetahuan, yang berupa penerimaan suatu kerangka makna (kerangka pengetahuan), penerimaan dan penolakan makna baru dengan proses orientasi ke disorientasi ke reorientasi sistem kognitifnya; (3) perubahan sistem tingkah laku yang berproses dari penerimaan tingkah laku baru; (4) perubahan sistem interaksi, di mana akan muncul gerak sosialisasi melalui dissosialisasi menuju resosialisasi; dan (5) perubahan sistem kelembagaan/pemantapan interaksi, yakni pergeseran dari tahapan organisasi ke disorganisasi untuk selanjutnya menuju reorganisasi.<sup>31</sup>

Di sisi lain, kiprah transformasi pesantren secara langsung juga makin mengukuhkan posisi Islam sebagai agama. Menurut Nur Syam, Islam yang kuat adalah ketika Islam menjadi basis kebudayaan. Sebab ketika Islam menjadi basis kekuasaan maka akan terjadi proses dialektika jatuh bangun. Islam kebudayaan adalah Islam yang tidak saling menafikan kebudayaan masyarakat dengan Islam sebagai ajaran suci. Relasi Islam dengan kebudayaan adalah sesuatu yang kompatibel dan bukan antonimi. Islam yang seperti ini adalah Islam produk dinamis dalam jangka panjang, yang saling memberi dan menerima dalam bingkai menempatkan Islam sebagai basis budaya. Jadi, Islam yang bukan *transplanted*, melainkan Islam yang menyejarah. Islam yang berdialog dengan habitus sosial dan kultural-psikologis masyarakat.<sup>32</sup>

Ada banyak cara yang dapat dilakukan pesantren dalam perspektif ini. Salah satunya melalui *pendidikan kritis*. Pendidikan masyarakat yang selama ini sudah terbangun melalui pesantren, kyai, ajengan, dan tokoh-tokoh lokal ternyata memiliki daya ampuh untuk mengimbangi

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 63-66.

<sup>31</sup> Ignas Kleden. 1987. *Sikap Ilmiah & Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES, h. 169-170.

<sup>32</sup> Nur Syam. 2007. *Madzhab-Madzhab Antropologi*. Yogyakarta: LKiS, h. 209-210.



kekuatan luar. Oleh sebab itu, perlu dibangun terus kekuatan-kekuatan lokal tersebut dengan pendidikan yang membebaskan meskipun tetap membuka diri dengan kemajuan tetapi tidak terpengaruh dengan arus budaya kapitalis yang secara laten memiliki agenda menjajah dan menindas.

Hasil penelitian Fatchan tentang pembelotan kyai pesantren di Malang dan Blitar terhadap sistem yang dikembangkan oleh pemerintah dalam budidaya pertanian, yang di baliknya ternyata adalah neoliberalis dengan politik revolusi hijau, menunjukkan bahwa mereka berhasil menciptakan sistem dan mekanisme sendiri secara kreatif. Dengan kepemimpinan lokal, seorang kyai dan sistem kekerabatan sosialnya mampu membangun komunitas strategis untuk melakukan proses-proses pendidikan masyarakat, tanpa harus dipengaruhi oleh himbaun, saran, bahkan provokasi dan intimidasi dari pemerintah melalui aparat desa, dan kecamatan serta penyuluh pertanian. Mereka tidak mau bersentuhan dengan sistem pasar yang cenderung menindas petani. Menolak sistem teknologi yang dalam jangka panjang disadari akan merugikan mereka sendiri. Demikian pula menolak sistem tanam yang diajarkan oleh para penyuluh pertanian, karena para penyuluh hanya mendasarkan diri pada teori pertanian, tidak memahami watak dasar tanah dan karakter musim yang ada di wilayah desa mereka.

Bentuk-bentuk perlawanan kyai dan masyarakat adalah: (a) menolak pola sewa, tetapi melakukan gadai sawah; (b) menolak pola tanam monokultur; (c) tindakan menolak kredit bank; (d) menolak pelatihan dari pemerintah (penyuluh pertanian), tetapi menerapkan pelatihan sistem *sorogan* dan *bandongan*; dan (e) menolak menggunakan pestisida, tetapi meramu racun hama sendiri.

Kekuatan kyai sebagai *local leader*, menyusun strategi untuk membela umat (rakyat) dari usaha-usaha penindasan para pemilik modal (*daokeh*) dengan sistem ijon, sewa lahan, kredit bank, dan penindasan lainnya begitu cukup efektif. Kyai melarang sistem-sistem yang menindas tersebut sekaligus memberikan pendidikan masyarakat, serta memberikan solusinya agar sawah tidak jatuh ke tangan orang lain, dan petani tidak terlilit hutang yang berbunga. Kyai memberi alternatif dengan sistem *gadai sawah*. Sistem ini menjadikan sawah tidak jatuh ke tangan pemilik modal, karena sawah digadaikan kepada pondok pesantren, yang hasil sawah tersebut untuk membangun kebutuhan masyarakat, khususnya pembangunan masjid, mushalla dan madrasah. Melalui sarana *jam'iyah*

*tablil* dan *pengajian* rutin, kyai membangun kesadaran masyarakat untuk menciptakan sistem sendiri, menolak sistem kapitalis yang akan menjerat mereka sendiri.<sup>33</sup>

Kyai dan masyarakat juga memiliki kreatifitas sendiri dalam menghadapi serangan hama tanaman dan serangan produk pestisida sebagai racun hama tanaman oleh proyek korporasi melalui tangan pemerintah dengan program-programnya. Mereka meramu racun sendiri dengan *baceman* bahan-bahan yang ada, sabun cuci, minyak tanah, dan bahan alami *tuba*. Dengan kreatifitas sendiri ini, mereka terhindar dari pengeluaran biaya tinggi untuk pembelian pestisida dan terhindar pula dari dampak negatif kesehatan atas produksi racun dari pabrik tersebut.<sup>34</sup>

## E. Penutup

Pluralisme dan multikulturalisme merupakan realitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Ia telah memperoleh sentuhan objektivasi dan telah menjadi bagian tidak terpisahkan di dalam relasi antar masyarakat. Interaksi sosial juga telah dipandu oleh adanya *pattern for behaviour* (pola bagi tindakan) yang menandakan adanya realitas sosial yang seperti itu. Jika kemudian terjadi benturan, sesungguhnya dipandu oleh variabel lain yang ingin menjadi dominan, misalnya, politik-kekuasaan, agama, dan ekonomi. Berbagai konflik yang terjadi sesungguhnya dipandu oleh keinginan satu atau lebih kelompok untuk menjadi dominan di dalam kehidupan sosial yang sebenarnya lebih menginginkan keteraturan sosial ketimbang konflik.<sup>35</sup>

Paparan di atas secara jelas menunjukkan besarnya peran yang dapat dilakukan dunia pesantren—sebagai institusi yang memiliki kemampuan kreatif berdialektika dengan budaya lokal—untuk membangun budaya damai dalam kehidupan masyarakat. Peran ini akan semakin kokoh manakala masyarakat yang didambakan itu sampai pada taraf yang mandiri. Kemandirian masyarakat merupakan modal penting dalam mencapai tujuan.

Memang tidak semua pesantren mampu melakukan peran-peran ini. Tetapi jika dilakukan usaha serius, semua pesantren memiliki

---

<sup>33</sup> Ach. Fatchan dan Basrowi. 2004. *Pembelotan Kaum Pesantren dan Petani di Jawa*. Surabaya: Yayasan Kampusiana, h. 125.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 160.

<sup>35</sup> Nursyam, *Madzhab-Madzhab*, h. 204.

peluang yang sama. Oleh karena itu, jika ingin pesantren memiliki kiprah dalam penciptaan kehidupan yang toleran dan saling menghargai, memang harus dilakukan usaha secara terus menerus dan konsisten. Dengan demikian, harapan terhadap kehidupan yang rukun, damai, dan penuh penghargaan akan tercapai. *Wallahu a'lam bis-showab.*

### SUMBER BACAAN

- A'la, Abd (2006): *Pembaruan Pesantren*. Yogyakarta, Pustaka Pesantren.
- Abdullah, M. Amin (2005): *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*. Jakarta, PSAP.
- Abdurrahman, Moeslim (1997): *Islam Transformatif*. Jakarta, Pustaka Firdaus, Cet. III.
- Azra, Azyumardi (1997): "Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan". Dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta, Paramadina.
- Dhofier, Zamakhsyari (1994): *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Para Kyai*. Jakarta, LP3ES, Cet. IV.
- Effendi, Bachtiar (1985): "Nilai Kaum Santri". Dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren*. Jakarta, P3M.
- Effendi, Djohan (2003): "Pesantren dan Kampung Peradaban, Sebuah Pengantar". Dalam Hasbi Indra, *Pesantren dan Transformasi Sosial*. Jakarta, Penamadani.
- Fadjar, A. Malik (1997): "Sintesa antara Perguruan Tinggi dan Pesantren". Dalam Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta, Paramadina.
- Fatchan, Ach. dan Basrowi (2004): *Pembelotan Kaum Pesantren dan Petani di Jawa*. Surabaya, Yayasan Kampusiana.
- Hadimulyo (1980): "Dua Pesantren, Dua Wajah Budaya". Dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*. Jakarta, LP3ES.
- Kleden, Ignas (1987): *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta, LP3ES.
- Kuntowijoyo (1991): *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*. Bandung, Mizan.
- Madjid, Nurcholish (1997): *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta, Paramadina.
- Mastuki HS dan Abd. Adhim (2004): *Sinergi Madrasah dan Pondok Pesantren*. Jakarta, Dirjend Bagais Depag RI.
- Wahid, Abdurrahman (2001): *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Jakarta, Desantara.